

EBTANAS SMU DAN UMPTN SEBAGAI BOTTLENECK: Perlunya Pembaruan Kebijakan Pendidikan yang Rasional

Yana Karyana

ABSTRACT

As an instrument to gauge the competence and competition in learning process, Ebtanas (Standard National Grades) and UMPTN (Admission Test for State Universities) in Indonesian education system have changed into a myth of schooling. Not only that the Ebtanas and UMPTN have become the aims of schooling, but also become "traffic lights" that direct schools' management. In the schools, teachers always encourage students to be successful in Ebtanas and UMPTN tests. They make Ebtanas and UMPTN as the only reference and guideline. Other subjects such as religion, morals, culture and literary appreciation, and personality development -- the important fundamentals for affective education -- are ignored. At the same time, parents and the society generally perceive school as a place for their children to drill their children to be able to compete in achieving a good Ebtanas Standard Grade (NEM) and a success in UMPTN. The Ministry of Education makes the NEM and UMPTN as the only indicators of the success of schooling.

The educational policy flaws are aggravated by other policy failures with 1994 Curriculum, which over-emphasising on formal schools of SLTP and SMU. Other vocational schools (SMK) that are in better position to provide employment and support economic development are generally marginalised. With the Curriculum 1994, all of the SLTP, SMU, and SMK students' achievement is measured by the NEM, and later by the UMPTN for entering the state universities. Consequently, the number of students who want to be enrolled in universities is not followed by the capacity. There is no doubt that Ebtanas and UMPTN constitute the bottleneck. There is a "university intoxicated zone" that must be corrected by: (1) Reconstructing Ebtanas and UMPTN simultaneously to create a rational flow to the university, and (2) To change the fundamental policy for higher education. It is urgently required that the government give a fair playing field to the formal as well as vocational schools.

Keywords: *education policy, students' achievement test, university admissions.*

PENDAHULUAN

Ebtanas SMU dan UMPTN: Perlukah Direformasi? Apabila kita mengacu pada berbagai fenomena

yang ada dan data-data hasil penelitian empirik¹, jawabnya tegas perlu. Lebih

¹ Salah satunya adalah disertasi yang ditulis oleh Toemin A. Masoem yang kemudian dibukukan

dari itu format mengenai jenjang dan jenis pendidikan menengah secara keseluruhan, juga perlu lebih direalistikkan. Format sekolah menengah sekarang yang hanya menekankan SLTP dan SMU, selain menyembunyikan target yang tidak realistis juga sangat mengingkari kenyataan adanya keragaman karakter dan potensi siswa, guru, sekolah maupun daerahnya sendiri. Disamping itu dengan adanya pola penekanan yang berlebihan pada SLTP/SMU ini, dan yang kemudian dijalankan simultan dengan *marginalisasi* martabat Sekolah Kejuruan membawa akibat timbulnya *bottleneck* di pintu masuk Perguruan Tinggi. Seluruh potensi siswa jadi tergiring untuk masuk ke "gerbang utama" universitas, sedangkan belajar di sekolah, akademi, atau perguruan tinggi kejuruan adalah kelas dua. Dorongan ini, meminjam istilah John Naisbitt dalam bukunya "*High Tech High Touch, (1999)*" membawa seluruh komponen publik: siswa, orangtua siswa, guru dan sekolah terjebak ke dalam *Zona Mabok* beruniversitas ria.

Dampak nyata yang segera terlihat adalah UMPTN tidak saja segera menjadi tujuan utama, tetapi juga "*traffic light*" yang mengatur cara sekolah beroperasi. Terlebih lagi ketika bahan uji Ebtanas SMU dan UMPTN sama persis bisa mengakibatkan distorsi yang semakin panjang. Guru di sekolah demi gengsi sekolah; terkonsentrasi memburu kisi-kisi Ebtanas dan UMPTN. Pelajaran lainnya; termasuk agama, budipekerti, sopan santun dan apresiasi sastra

budaya misalnya, yang notabene menjadi basis penting bagi pendidikan afektif (moral) dikalahkan. Para orangtua dan masyarakat pada umumnya menjadikan sekolah sebagai ajang pentas kejuaraan anak-anaknya untuk mendapatkan NEM tinggi. Di lain pihak, birokrasi Diknas seolah membudidayakannya dengan mendistorsi NEM sebagai tujuan pendidikan. Pendek kata semua elemen masyarakat "tersihir" Ebtanas dan UMPTN, instrumen berubah menjadi tujuan. Lalu terjadilah apa yang penulis sebut sebagai "kelirumulogi bersekolah", karena NEM sebagai hasil Ebtanas dianggap sebagai satu-satunya patokan keberhasilan bersekolah. Ketika banyak siswa memperoleh NEM tinggi dan kemudian diterima di UMPTN, segera pula disimpulkan bahwa: "NEM ya UMPTN itu, titik!". Hebat NEM-nya jaminan hebat pula UMPTN-nya.

Ada nuansa "*Zona Mabok Universitaria*" yang harus diluruskan, sehingga apabila fenomena *bottleneck* (macet di leher jenjang Universitas) ini bisa dipecahkan, pengembangan format tes UMPTN tidak perlu terkonsentrasi pada target "kecanggihan menjebak" siswa dengan hal-hal teknis yang tidak perlu². Akan tetapi lebih pada pendalamannya (katakanlah "pendalaman" tes potensi akademik). Dengan demikian UMPTN cukup menjadi salah satu instrumen penguji kompetensi dan kompetisi yang jelas jangkauan targetnya dalam

dengan judul "Ebtanas atau UMPTN: Mana Yang Lebih Dapat Diandalkan". 1997.

² Hal-hal teknis yang penulis maksudkan seperti pengisian data peserta pada lembar isian komputer yang dikaitkan dengan indikator penentuan kelulusan UMPTN. Banyak bukti menunjukkan bahwa tidak sedikit peserta cerdas yang gagal UMPTN hanya karena ada kekeliruan dalam mengisi data pada lembar isian komputer.

memproyeksi kemampuan peserta untuk sukses belajar di Universitas. Di luar itu dibuka kesempatan adanya matrikulasi bagi peserta yang berasal dari luar jalur untuk melanjutkan studi ke Akademi atau Sekolah Tinggi Kejuruan. Cara ini bisa memungkinkan di tempuh apabila sejak awal arus yang masuk ke Perguruan Tinggi bisa dipecah. Dengan kata lain harus ada sejumlah proporsi rasional yang didorong masuk ke Sekolah Tinggi dan Akademi Kejuruan yang bertumpu pada realitas kemampuan yang ada serta kebutuhan Otonomi Daerah. Bahkan idealnya pemecahan gelombang itu dilakukan sejak tingkat SLTP. Inilah alternatif yang penulis tawarkan.

Uraian tulisan berikutnya menyangkut: (1) Implikasi Ebtanas/UMPTN terhadap kualitas dan orientasi pengajaran di SMU, (2) Fenomena Bimbingan Belajar: Implikasi terhadap murid, guru dan orientasi pendidikan, dan (3) Alternatif sistem evaluasi belajar dan seleksi masuk perguruan tinggi.

EBTANAS DAN UMPTN SEBAGAI INSTRUMEN YANG DIMITOSKAN

Setiap instrumen penilaian tidak terkecuali EBTANAS mempunyai *reasoning* tujuan penilaian yang berbeda. Ebtanas hakekatnya adalah salah satu instrumen penguji keberhasilan pengajaran di sekolah, baik SD, SLTP, SMU, maupun SMK. Dalam moralitas menilai, paling tidak terdapat beberapa fragmen yang diperhatikan, diantaranya: guru, siswa, organisasi, fasilitas dan kurikulum. Ini

berarti, NEM bukan semata persoalan siswa. NEM yang *jeblok* juga sangat mungkin merupakan indikasi kegagalan guru dalam mengajar. Penulis yang bekerja di Pusat Klinik Pendidikan Indonesia mempunyai banyak data empirik, bahwa dari segi "Klinik Kelas" salah satu penyebab kejatuhan NEM itu bersumber pada kesalahan guru mengajar. Selain CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) telah gagal, kebanyakan pengajaran di kelas kurang memperhatikan potensi dan gaya belajar masing-masing siswa. Kebanyakan guru mengajar pada dimensi dan gelombang auditorial, sementara para siswa yang mempunyai tipe belajar kinestetik dan visual seringkali menjadi korban. Jika siswa yang jadi korban tersebut NEMnya rendah, maka ini berarti NEM rendah itu lebih merupakan persoalan guru. Tetapi kenapa siswa yang harus menanggung, sehingga ia akhirnya hanya bisa diterima di sekolah yang kurang baik kualitasnya?

Melalui analisis regresi terhadap data rata-rata NEM untuk setiap propinsi pada tahun ajaran 1993 sampai 1995, Toemin A. Masoem (1997) menemukan bahwa Ebtanas sebagai alat untuk ujian akhir kurang begitu baik, dan sebagai alat seleksi penerimaan mahasiswa baru juga tidak cocok. Temuan Toemin lain yang aneh tapi nyata adalah meskipun *de facto* kebanyakan SMU di luar Jawa berada di bawah Jawa, namun rata-rata dan ragam NEMnya hampir sama. Data sejenis untuk tahun ajaran berbeda (1999/2000) yang penulis dapatkan dari internet <http://www.ebtanas.org> juga menunjukkan hal sama.

Tabel 1. Rata-rata NEM SMU (Negeri dan Swasta) Tahun Ajaran 1999/2000 Jurusan IPA

No.	PROPINSI	JUMLAH		NEM								Jml NEM	Pering kat
		Sekolah	Peserta	PKN	BIN	ING	FIS	BIO	KIM	MAT	TOT		
1	DI Aceh	196	11.599	5,68	5,24	3,83	2,74	3,88	3,63	2,27	3,90	27,27	20
2	Sumut	554	35.971	5,87	4,79	4,26	3,10	3,48	3,69	2,76	3,99	27,95	18
3	Riau	125	5.821	6,75	5,23	4,49	3,52	4,33	4,46	3,13	4,56	31,91	11
4	Sumbang	158	9.735	7,98	7,16	5,86	4,52	5,80	5,45	4,31	5,87	41,08	1
5	Jambi	84	3.622	6,36	5,12	4,39	3,11	3,84	3,88	2,70	4,20	29,40	17
6	Sumsel	268	14.081	6,48	5,08	4,65	3,48	4,03	4,27	3,38	4,48	31,37	12
7	Lampung	174	9.159	6,88	5,55	4,67	3,90	4,45	4,38	3,53	4,77	33,36	9
8	Bengkulu	66		6,38	5,11	3,45	2,81	3,73	3,54	2,62	3,95	27,64	19
9	DKI Jakarta	407	23.364	6,96	6,19	6,36	4,71	5,63	5,84	4,33	5,72	40,02	2
10	Jabar	798	62.103	6,56	5,74	4,87	3,51	4,53	4,37	2,92	4,64	32,50	10
11	Jateng	685	49.008	7,38	5,80	5,19	4,03	4,75	4,89	3,56	5,09	35,60	7
12	DIY	165	9.402	7,46	6,59	5,45	4,43	5,15	5,11	3,80	5,43	37,99	4
13	Jatim	781	51.115	6,99	6,04	5,40	3,80	5,27	5,18	3,65	5,19	36,33	6
14	Kalbar	99	3.481	6,77	5,31	4,35	3,19	4,00	3,92	2,72	4,32	30,26	14
15	Kalsel	73	2.964	6,80	5,97	4,34	3,23	3,72	4,03	2,83	4,42	30,92	13
16	Kaleng	65	2.499	6,22	4,66	3,67	2,65	3,59	3,21	2,40	3,77	26,40	21
17	Kaltim	85	4.377	5,79	4,95	4,71	3,48	4,09	4,01	2,96	4,28	29,99	16
18	Bali	114	7.245	7,00	6,11	5,78	4,08	4,80	4,81	3,96	5,22	36,54	5
19	NTB												
20	NTT												
21	Sulut	137	5.137	6,18	4,80	4,97	3,47	3,87	4,05	2,86	4,31	30,20	15
22	Sulteng												
23	Sulse			7,34	6,67	5,89	4,63	5,09	5,56	4,43	5,66	39,61	3
24	Sultra	65	3.700	6,37	5,11	5,43	4,55	4,53	5,29	3,92	5,03	35,20	8
25	Maluku												
26	Irja												
	NASIONAL	5.099	314.383	6,75	5,69	5,04	3,73	4,61	4,63	3,34	4,82	33,77	

(sumber: <http://www.ebtanas.org>, 2001)

Tabel 2. Rata-rata NEM SMU (Negeri dan Swasta) Tahun Ajaran 1999/2000 Jurusan IPS

No.	PROPINSI	JUMLAH		NEM							Jumlah NEM	Pering kat	
		Sekolah	Peserta	PKN	BIN	ING	EKO	SOS	TAN	MAT			TOT
1	DI Aceh	180	11.245	4,89	4,42	3,09	3,24	4,05	3,89	2,58	3,74	26,16	19
2	Sumut	520	37.758	5,21	4,18	3,50	3,63	3,98	3,66	2,66	3,83	26,82	18
3	Riau	162	14.479	5,87	4,34	3,56	3,90	4,33	4,12	2,71	4,12	28,83	13
4	Sumbang	173	17.269	7,15	6,26	4,61	4,95	5,91	5,77	4,22	5,55	38,87	2
5	Jambi	107	6.434	5,58	4,39	3,42	4,09	4,21	3,95	2,71	4,05	28,35	14
6	Sumsel	351	28.456	5,75	4,30	3,77	3,87	4,24	4,07	3,09	4,16	29,09	12
7	Lampung	233	16.239	6,32	4,93	3,87	4,35	4,68	4,53	3,38	4,58	32,06	7
8	Bengkulu	77		5,61	4,38	2,79	3,25	4,19	3,66	2,28	3,74	26,16	19
9	DKI Jakarta	469	44.194	6,54	5,76	5,83	5,91	5,55	5,71	4,45	5,68	39,75	1
10	Jabar	934	84.734	5,92	5,03	4,04	4,25	5,16	4,57	2,93	4,56	31,90	8
11	Jateng	805	74.779	6,72	5,03	4,03	4,47	4,90	4,85	3,32	4,76	33,32	6
12	DIY	198	14.126	6,80	5,76	4,09	6,10	5,85	5,87	3,29	5,39	37,76	4
13	Jatim	957	70.771	6,34	5,25	4,17	4,69	5,26	5,10	3,52	4,90	34,33	5
14	Kalbar	162	10.778	5,75	4,37	3,31	3,74	4,30	4,02	2,45	3,99	27,94	15
15	Kalsel	91	6.808	5,96	5,04	3,14	3,79	4,91	3,97	2,52	4,19	29,33	11
16	Kaleng	88	4.445	5,32	3,92	2,77	3,03	3,74	3,44	2,22	3,49	24,44	20
17	Kaltim	126	7.818	5,82	4,19	3,51	3,73	4,10	3,86	2,67	3,98	27,88	16
18	Bali	146	11.556	5,85	4,98	3,99	4,05	4,21	4,34	2,80	4,32	30,22	9
19	NTB												
20	NTT												
21	Sulut	178	7.782	5,18	4,03	3,67	3,77	3,84	3,81	2,57	3,84	26,87	17
22	Sulteng												
23	Sulse			6,94	6,50	5,04	5,09	4,96	4,84	5,09	5,49	38,46	3
24	Sultra	80	6.350	5,40	4,37	4,10	4,53	4,00	4,09	3,28	4,25	29,77	10
25	Maluku												
26	Irja												
	NASIONAL	6.037	476.021	6,12	4,97	4,08	4,43	4,87	4,67	3,23	4,63	32,38	

(sumber: <http://www.ebtanas.org>, 2001)

**Tabel 3. Rata-rata NEM SMU (Negeri dan Swasta) Tahun Ajaran 1999/2000
Jurusan Bahasa**

No.	PROPINSI	JUMLAH		NEM								Jumlah NEM	Peringkat
		Sekolah	Peserta	PKN	BIN	ING	SAS	BAS	SBU	MAT	TOT		
1	DI Aceh	8	251	5.08	4.06	3.41	4.25	4.20	4.60	2.40	4.00	28.00	21
2	Sumut	15	438	5.59	4.49	3.94	4.28	4.15	4.31	2.30	4.15	29.06	20
3	Riau	15	466	6.20	4.75	3.75	4.73	4.35	4.80	2.44	4.43	31.02	14
4	Sumbar	22	828	7.22	6.03	4.95	6.07	5.73	6.30	3.90	5.74	40.20	1
5	Jambi	12	376	5.97	4.86	3.75	4.51	4.01	4.75	2.50	4.34	30.35	16
6	Sumsel	3	95	6.63	5.24	5.58	5.01	6.11	4.93	2.97	5.21	36.47	8
7	Lampung	6	167	6.96	6.01	5.23	5.80	4.96	5.80	3.54	5.47	38.30	7
8	Bengkulu	5		6.21	4.39	3.40	5.19	3.77	5.05	2.56	4.37	30.57	15
9	DKI Jakarta	43	1.550	6.64	5.23	5.74	5.50	5.58	5.79	3.88	5.48	38.36	6
10	Jabar	101	3.451	6.33	5.25	4.43	4.84	4.98	5.10	2.81	4.82	33.74	9
11	Jateng	69	2.129	7.13	5.85	5.39	5.52	5.92	5.57	3.54	5.56	38.92	4
12	DIY	10	254	7.29	5.68	5.62	5.59	5.57	5.26	3.36	5.48	38.37	5
13	Jatim	102	3.302	6.77	5.73	5.39	5.77	6.20	5.45	3.62	5.56	38.93	3
14	Kalbar	7	225	6.10	4.40	3.61	4.70	4.16	4.52	2.30	4.26	29.79	18
15	Kalsel	15	378	6.26	5.07	3.72	4.97	4.58	4.80	2.53	4.56	31.93	12
16	Kalteng	7	206	5.90	4.91	3.83	4.51	3.73	4.78	2.34	4.29	30.00	17
17	Kaltim	18	568	6.26	4.67	4.44	4.73	4.16	4.81	2.75	4.55	31.82	14
18	Bali	61	4.115	6.04	4.97	4.22	4.89	5.57	4.81	2.89	4.77	33.39	10
19	Ntb											-	-
20	Ntt											-	-
21	Sulut	72	1.929	5.31	4.29	4.01	4.40	4.78	4.46	2.50	4.25	29.75	19
22	Sulteng											-	-
23	Sulse			7.15	6.72	5.29	5.13	6.04	5.43	4.09	5.69	39.85	2
24	Sultra	17	469	5.69	4.72	3.92	4.71	4.73	4.92	3.69	4.63	32.38	11
25	Maluku											-	-
26	Irija											-	-
	NASIONAL	608	21.197	6.34	5.19	4.65	5.10	5.33	5.13	3.10	4.98	34.85	

(sumber: <http://www.ebtanas.org>, 2001)

Apabila NEM dijadikan ukuran kualitas, maka data pada tabel diatas menunjukkan bahwa SMU di luar Jawa kira-kira sama atau sedikit lebih baik dari lulusan SMU di Jawa. Pada kenyatannya, UI, UGM dan beberapa PTN lainnya masih mengeluarkan anggarannya sendiri untuk membiayai matrikulasi bagi mahasiswa asal luar Jawa, yang meskipun mereka masuk dengan (dan NEM) yang "menakutkan" tetapi kenyataannya tertinggal jauh dari mahasiswa asal Jawa yang mempunyai NEM masuk di bawahnya. Terbukti bahwa NEM sama sekali bukan ukuran nasional.

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Guru Besar Statistik

IPB, Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, yang notabene ikut membidani kelahiran Ebtanas. Menurutnya maksud dibuat Ebtanas adalah ditujukan untuk mendapatkan nilai yang dapat dibandingkan secara nasional. Namun dalam pelaksanaannya Ebtanas tidak menggunakan perangkat uji yang dibakukan secara nasional, melainkan berbeda-beda pada setiap propinsi dan bahkan dari kabupaten ke kabupaten. Karena itu meskipun namanya Ebtanas, namun dia bukan fenomena nasional betul "Sebuah kejanggalan yang telah saya ramalkan pada rapat persiapan penyelenggaraan Ebtanas dulu" (Kompas, Nopember 1997).

Bagaimana halnya dengan UMPTN?

Teori menyebutkan bahwa keandalan dari suatu ujian seleksi diukur dari hubungannya antara nilai ujian tersebut dengan sesuatu nilai atau kriteria lain yang diukur di kemudian hari. Perhatian utama dalam mempelajari keandalan tersebut adalah indikator dari kesuksesan yang harus dapat dijelaskan oleh nilai ujian seleksi (Thorndike, 1982). Sementara ketepatan prediksi terhadap keandalan itu sendiri tergantung pada ketepatan dalam menentukan pengukuran (Crobach, 1971).

Apabila UMPTN dimaksudkan sebagai instrumen ujian seleksi, maka seharusnya panitia ujian dapat menyajikan keandalan pendugaannya dalam bentuk korelasi antara nilai ujian dengan ukuran prestasi di kemudian hari (Angoff, 1988). Sehingga ketika UMPTN begitu "didewa-dewakan" publik sebagai (satu-satunya) sarana untuk merebut "mobilitas vertikal" betul-betul mempunyai *akuntabilitas sosial* yang tinggi. Pada kenyataannya panitia UMPTN belum dapat membuktikan bahwa secara nasional prestasi mahasiswa baru dapat diduga secara tepat dengan nilai UMPTN. Artinya, lulus UMPTN belum tentu dengan sendirinya bisa menjadi jaminan sukses seseorang menempuh Perguruan Tinggi. Fakta menunjukkan bahwa dari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi saja, banyak mahasiswa yang mengalami kemunduran. Misalnya di UGM sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik sekalipun, masa studi mahasiswa rata-rata 5,5 tahun. Satu

tahun lebih lama dari 4,5 tahun masa studi yang diproyeksikan. Ini dari ukuran lamanya masa studi, belum bicara masalah kualitas mahasiswa. Yang jelas tingkat pengangguran sarjana kita masih tinggi yaitu 36,6% (BAPPENAS, 1996), tidak termasuk jumlah mahasiswa dan sarjana yang mengalami *drop out* ataupun *miss match*.

UMPTN dengan demikian masih menyisakan banyak kelemahan, yang antara lain karena materi uji yang jadi variabel ukur guna memprediksi potensi calon mahasiswa masih menggunakan ukuran *all size*. Untuk jurusan apapun baik peserta yang berasal dari SMU maupun SMK materi ujinya adalah sama. Dan ini adalah sebuah kekeliruan yang cukup fatal.

Kesimpulan kita adalah ternyata kedua-duanya (NEM dan UMPTN) bukan sesuatu yang layak dijadikan ukuran dalam menilai kompetensi dan kompetisi hasil persekolahan, apalagi dianggap satu-satunya tiket sukses bagi para pelajar merebut kesempatan belajarnya. Di dalamnya masih penuh mitos adalah jelas. Sebenarnya dengan menerima fakta bahwa "kurikulum 1994" pada kenyataannya (diirancang) hanya akan bisa dijalani oleh maksimal 30% siswa yang tergolong cerdas, maka EBANAS adalah pemborosan dana nasional. Apalagi hasilnya tidak dipakai untuk menentukan "kelulusan" seseorang³. Ebtanas baru bisa disebut layak pembiayaan apabila ada jaminan dari sistem yang bisa **menggiring** dan **menyaring** secara lebih dini jumlah

³ Ebtanas masih harus digabung dengan nilai cawu 1 & 2 klas 3, itulah penentu kenaikan. Sebuah strategi "aneh" yang terpaksa dilakukan karena sadar bahwa kurikulum 1994 memang "bermasalah" bagi bagian terbesar populasi pelajar kita.

70% siswa di bawah standar ke program studi lain yang memang tidak ditujukan untuk meneruskan ke Universitas. Pemborosan juga terjadi karena rancang bangun kurikulum 1994 didisain untuk saringan *elitis*, tetapi pelaksanaannya sangat *populis*, kasarnya "sampah" pun bisa masuk mengikuti kurikulum 1994. Akibatnya terjadilah apa yang dalam buku penulis ("*Menjadi Pemenang UMPTN*", terbitan Pusat Klinik Pendidikan Indonesia, 2001) disebut sebagai *bottleneck sistem persekolahan*.

Menurut penulis, fenomena ini adalah korban dari salahnya "politik pendidikan" kita. Kenapa semua siswa mesti digiring masuk ke SLTA Kurikulum 1994 yang notabene dirancang untuk masuk ke Universitas. Setelah seluruh siswa tergiring ke SMU (strategi *populis*) mendadak dilakukan penyaringan masuk ke Perguruan Tinggi (strategi *elitis*). Kalau tahu bahwa Kurikulum 1994 hanya cocok untuk 30% saja dari populasi, mengapa tidak dari awal strategi penyaringan dilakukan?

Seandainya pun strategi ini dilakukan, maka penulis melihat bahwa EBANAS mungkin cukup dilakukan di SLTA Unggulan saja (bukan SMU sekarang), dan itu jumlahnya sangat sedikit, populasinya juga sedikit hanya bagi sekitar 30% siswa dan akan bisa menghemat anggaran Diknas. Atau bila perlu dihapus sama sekali. Sejalan dengan itu, UMPTN sebagai instrumen penyaringan bibit unggul harus diredifinisi dan direkonstruksi kembali, terutama yang menyangkut materi uji. Inilah jalan keluar yang paling *fair*. Kemudian tahun depan, segera pecah arus yang kemungkinan akan

menyebabkan terjadinya *bottleneck* di SMU. Dengan cara demikian, tidak akan ada "persoalan" yang dijawab dengan "persoalan baru" yang nantinya menuntut jawaban dengan "persoalan baru" yang lebih dilematik lagi.

DAMPAK NEGATIF TERHADAP DUNIA PERSEKOLAHAN.

Sebagai instrumen, walaupun Ebtanas dan UMPTN masih mempunyai berbagai kelemahan sebagaimana ditemukan Toemin, tetap masih bisa diperbaiki. Yang sulit perbaikannya—karena distorsi ini terjadi di level masyarakat—adalah ketika Ebtanas dan UMPTN berubah menjadi "tujuan" yang diburu oleh publik: Guru, Ortu, siswa dan sekolah dengan penuh *euforia* perburuan. Ironisnya perubahan tersebut menyebabkan skala prioritas para guru dalam mengajar menjadi terbelokkan. Dalam beberapa sekolah bidang pelajaran yang "di-Ebtanaskan" menjadi *anak emas*. Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Biologi dan Kimia, memang sarana untuk berkompetisi di era global, tetapi mengabaikan apresiasi agama, sastra budaya dan pengembangan kepribadian, yang justru penting untuk pembinaan kecerdasan spiritual dan emosional siswa; yang notabene kini menjadi *trend* Sekolah Global adalah suatu kekeliruan besar.

Saat ini porsi "pendidikan" di sekolah telah *teredusir* menjadi "pengajaran". Bagi orang tua, sebuah sekolah dinyatakan baik atau buruk dilihat dari seberapa hebat sekolah tadi dapat menghasilkan NEM tinggi. Kebijakan pemerintah pun diarahkan ke hal yang sama. Pelaksanaan

Ebtanas, sebelum setahun ini sesungguhnya lebih banyak diwarnai oleh *mark-up* nilai tersebut, tragisnya dibantu dan dihitung oleh "utusan" Kandep/Kanwil Diknas sendiri. Sekolah yang menghasilkan rata-rata NEM tertinggi, dipuji di rapat-rapat Kanwil. Para guru pun "tersihir" seolah itulah tujuan pendidikan. Memang tragis, apa yang terjadi lewat tragedi NEM ini adalah proses marginalisasi masyarakat miskin. Mereka yang kaya dan bergizi, memiliki peluang untuk mengambil berbagai privat, sekolahnya pun di sekolah terbaik. Wajar NEM mereka tinggi. Sementara yang miskin, sudah kesempatannya kecil sekolahnya pun di pinggir, akibatnya NEM nya juga kecil. Sebuah pelanggaran kemiskinan sejak anak masih (dan oleh) sekolah. (Suyanto, 2001).

Dalam banyak kasus, soal Ebtanas seringkali diperjualbelikan. Berita koran hampir setiap tahun memuatnya. Selain itu dalam banyak praktik, kepala sekolah selalu mendapat tekanan (nyata maupun tersamar) untuk sedapat mungkin meluluskan semua siswanya. Hanya siswa yang luar biasa bodohnya terpaksa tidak lulus sekolah. Biasanya kepala sekolah sudah dapat mengetahui siapa yang tidak lulus, jauh sebelum Ebtanas diselenggarakan (Toemin, 1997). Praktik yang lazim dilakukan adalah dengan melakukan *mark-up* nilai cawu 1 dan 2, supaya kalau nanti digabung (ada rumusnya) dengan perolehan NEM (yang sudah diduga *jeblok*) dapat menghasilkan kelulusan.

Hasil penelitian Toemin ini, sebenarnya baik untuk direnungkan publik. Setelah melalui analisis yang

mendalam didapatkan bukti bahwa apabila seseorang peserta UMPTN dalam meraih nilai tinggi, dapat dipastikan bahwa NEM anak ini pasti tinggi. Tetapi ini tidak bisa dibalik, bahwa mereka yang NEM-nya tinggi, otomatis akan bisa mendapatkan nilai UMPTN tinggi. Kenyataan ini semakin membuktikan (karena angkanya secara statistik cukup signifikan) bahwa memang banyak NEM asli-palsu beredar di medan UMPTN.

Penelitian lain memang mendukung adanya dampak negatif UMPTN terhadap orientasi guru mengajar di level sekolah menengah umum maupun kejuruan. Apa yang dipersyaratkan oleh panitia seleksi sering dijadikan pedoman untuk menentukan apa yang harus diutamakan dalam pendidikan di sekolah lanjutan. Bahkan apa yang diuji oleh panitia seleksi bisa mengubah kurikulum sekolah lanjutan, sehingga kurikulum tersebut tidak cocok untuk sebagian anak didik yang sebenarnya tidak akan meneruskan ke pendidikan tinggi (Klitgaard, 1991).

Persoalan ini menjadi sangat rumit ketika banyak bermunculan lembaga-lembaga bisnis jasa bimbingan belajar. Di sini bias dari makna bersekolah menjadi semakin melembaga. Kalau dirunut, urutan kerumitan itu kira-kira begini:

1. Format Sekolah yang ada SLTP/SMU menggiring arus siswa tumpah ruah ke Universitas, sementara jalur Akademi dan Sekolah Tinggi Kejuruan yang sebenarnya sangat dibutuhkan di lapangan kerja sangat sepi peminatnya.
2. Akibatnya terjadilah *bottleneck* di pintu masuk Universitas (UMPTN)

- yang dianggap sebagai “gerbang tol” paling efektif untuk merebut mobilitas vertikal, jadi PNS misalnya.
3. Penumpukkan arus yang tidak bisa sepenuhnya tersalurkan di jalur UMPTN ini, mendorong seseorang memikirkan perlunya *suplemen* belajar. Munculah sebuah *needs* baru.
 4. Lembaga Bimbingan Belajar adalah lembaga yang mencoba menjawab permintaan pasar tersebut. Walaupun persoalan eksistensi lembaga bimbingan belajar ini hanyalah sekedar bentuk *metamorfose* yang lebih profesional dari les-les privat yang biasa dilakukan oleh guru-guru sekolah atau pihak lainnya.

BIMBINGAN BELAJAR, SEBUAH FENOMENA PASAR

Maka kalau dilihat dari alur ini, fenomena bimbingan belajar (Bimbel) sebenarnya adalah fenomena *eksesial* belaka. Bimbel hanyalah asap saja dari api kekacauan jalur pendidikan yang mendorong terjadinya *bottleneck* di jalur universitas. Asap, apabila akumulasi sumber apinya tak terlalu besar biasanya akan segera hilang terbawa angin. Tetapi masalah Bimbel ini, berakar pada “sumber api” yang dalam kenyataannya semakin hari semakin membesar. Dampak persoalan yang dimunculkannya pun cukup pelik, betapa pun dalam banyak kasusnya agak bersifat subyektif, emosional dan bernada kecemburuan fungsional. Maka kalau diderivasikan lagi dalam urutan sebab akibat, urutannya menjadi sebagai berikut:

1. Format SLTP/SMU yang ada sekarang ini menimbulkan tekanan *bottleneck* di jalur universitas (UMPTN) yang semakin hari semakin berat.
2. Jumlah siswa cerdas yang masuk di jalur ini semakin hari juga semakin banyak, keadaan ini tidak disertai oleh peningkatan daya tampung di perguruan tinggi.
3. Muncullah akibatnya yakni format soal UMPTN yang semakin tahun semakin sulit. Begitu banyaknya administrasi lembar isian yang memerlukan ketelitian harus diisi siswa sebelum menggarap soal-soal⁴, adalah sebuah medan jebakan psikologis yang menunjukkan bahwa panitia cukup sadar dan dipusingkan oleh jumlah pendaftar cerdas ini. Oleh karena keperluan itu pula tingkat jebakan dan kesulitan soal harus terus menerus ditingkatkan. Hanya si super cerdas yang matang *Emotional Intellegency*-nya saja yang bisa lolos UMPTN. Yang cerdas, tapi *kemrungsung* jangan harap.
4. Kecanggihan UMPTN dalam memberikan jebakan tersebut memunculkan “*needs*” baru, yaitu kebutuhan publik akan “jasa *drilling*” pemodelan soal-soal UMPTN. Siswa butuh *drilling* agar mereka *familiar* dengan tipe-tipe soal UMPTN.
5. Inilah masalahnya, Guru di sekolah disamping oleh faktor obyektif

⁴ Seperti diketahui, sebelum menggarap soal-soal UMPTN, peserta diwajibkan mengisi data pribadinya pada Lembar Jawab Komputer dengan pensil khusus 2B. Disini ketelitian menjadi hal yang utama, karena bila salah membubuhkan bulatan isian pada satu huruf atau satu angka saja, maka hasil pengerjaan peserta tidak akan bisa diproses oleh Komputer pemeriksa.

beban kurikulum yang harus diselesaikannya, menyebabkan mereka kurang perhatian (peka) membaca "permintaan pasar" ini. Akibatnya bisnis bimbingan belajar menjadi semakin merebak.

6. Terjadilah apa yang penulis sebut sebagai "pembelahan sel" kepercayaan. Dalam hal pembelajaran teori, siswa menerima dari guru. Tetapi dalam hal pembudidayaan teori tadi untuk konteks UMPTN, ke lembaga-lembaga bimbingan belajarlah siswa mencari pelatihan.
7. Bimbel yang menjamur berdampak lebih menguatkan mitos kelirumologi bahwa sukses UMPTN adalah sukses ber-Bimbel-ria.
8. Membicarakan Bimbel sebagai sebuah "pasar", berarti membicarakan baik buruknya pasar. Dalam perjalanannya, ada bimbel yang demi mempertahankan eksistensinya menempuh jalan kolaborasi dengan para guru bidang studi yang di-Ebtanas-kan. Soal yang diajarkan si guru tadi (katakanlah di Bimbel kolaborasinya), tak jarang adalah soal yang akan keluar pada ujian Cawu di sekolah tempat di mana si guru mengajar, sehingga siswanya lari ke Bimbel tempat guru tadi membuka praktik kolaborasi.
9. Dari segi klinik pendidikan, arus pembelahan kepercayaan kepada bimbel itu, rupanya didorong pula oleh lemahnya kemampuan *entertaint* guru dalam mengajar. Materi-materi Matematika, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika adalah materi yang harus diajarkan sedemikian rupa sehingga siswa merasa *fun*

agar mudah menyerap pelajaran. Sebaliknya, di sekolah malah menjadi ajang penampilan "seram" sang guru dalam mengajar. Guru juga nampak kurang menyapa masing-masing potensi dan gaya belajar setiap siswanya. Di lembaga bimbingan belajar meskipun sifat pengajarannya tetap klasikal, tetapi pendekatan *tentor* kepada siswa sangatlah individual. Disamping itu wawasan tentang prospek dan perspektif bidang studi maupun strategi belajar dan wawasan ke-UMPTN-an kerap diberikan. Barangkali inilah salah satu kontribusi bimbel terhadap dunia persekolahan.

10. Di lembaga bimbingan belajar siswa merasa *home*, sementara di sekolah mereka *stress* karena sekedar memenuhi rutinitas bersekolah tanpa motivasi yang kuat untuk belajar.

Jadi sekurangnya ada 10 faktor yang menyebabkan lembaga bimbingan belajar semakin hari semakin menjamur. Hal ini membuktikan bahwa ada sesuatu yang salah dalam sistem persekolahan kita. Anak didik yang merasa tidak terpuaskan oleh sekolah, mencari penggantinya di luar sekolah. Penulis sendiri berpendapat, terlepas dari ada tidaknya UMPTN, selama cara mengajar guru di sekolah tidak berubah menuju pada sistem pembelajaran yang memperhatikan berlangsungnya "klinik kelas"⁵, maka

⁵ Klinik, artinya adalah *interaksi* antara: guru, siswa, bahan ajar dan media di kelas atau ruang kelas, yang terjadi dalam konteks pengajaran. Klinik kelas yang baik adalah guru mengajar dengan memperhatikan masing-masing "potensi dan gaya

selama itu pula akan muncul permasalahan daya serap siswa. Sesuatu yang pada gilirannya akan memunculkan kebutuhan siswa terhadap lembaga jasa baru di luar sekolah yang mereka posisikan sebagai *suplemen* belajar.

Jadi jelas bagi kita sekarang bahwa Ebtanas dan UMPTN memang bermasalah.

Tapi "kebermasalahannya" hanyalah eksekusi semata dari sistem persekolahan kita yang salah. Sistem persekolahan kita sekarang ini sangat mengabaikan kenyataan dan kebutuhan lapangan. Yang dimanjakan hanya jalur SLTP/SMU saja. Kurikulumnya juga hasil tiruan Kurikulum Eropa⁶ yang sejak awal dirancang memang hanya untuk siswa cerdas yang diproyeksikan masuk ke jalur universitas.

Bahkan lebih mendasar lagi, Prof. Djohar (2001) mengatakan bahwa sistem persekolahan kita sekarang hanya memperhatikan anak yang akan melanjutkan studi, dan tidak pernah memikirkan mereka yang ingin masuk ke dalam masyarakat pada tiap akhir jenjang pendidikan. Persekolahan kita juga tidak pernah merumuskan kompetensi apa yang diharapkan diperoleh anak pada tiap mengakhiri jenjang sekolah, dan memikirkan pengalaman belajar apa yang seharusnya diperoleh siswa agar kompetensi akhir setiap jenjang pendidikan tercapai.

Sementara praksis pendidikan kita telah terjerumus kepada hal-hal yang tidak fungsional bagi kepentingan siswa, yakni kearah rangking, NEM, dan memasuki sekolah lanjut yang mungkin di luar kapasitasnya. Disamping itu, potret dunia persekolahan kita lebih merupakan praktek suap pengetahuan yang hanya menghasilkan makelar-makelar pengetahuan dan menjadi manusia yang tergantung, kecuali yang sadar dan sengaja keluar dari sistem⁷.

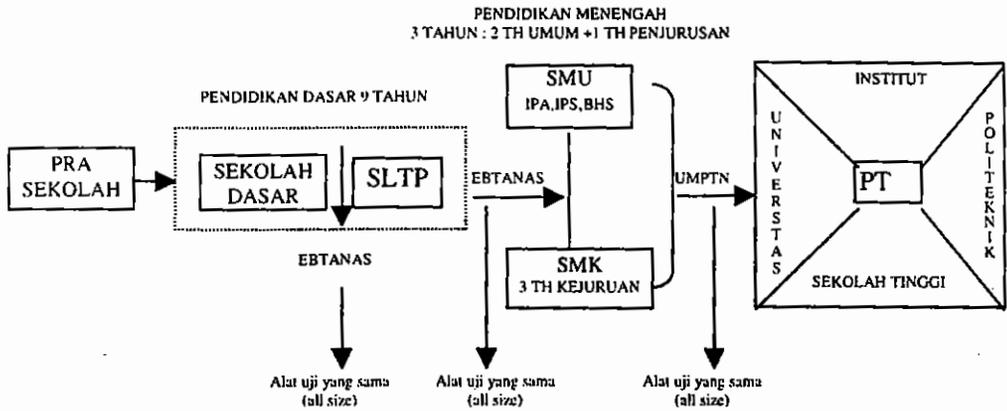
REFORMASI JALUR SEKOLAH: SEBUAH ALTERNATIF

Selama ini, arus jenjang sekolah menimbulkan *bottleneck* karena formatnya memang menggiring siswa, sejak dari SMP, SMU untuk menuju ke Universitas. Terutama dengan diterapkannya kurikulum 1994 sebagaimana nampak dalam Bagan 1 berikut ini.

belajar" siswa dengan memperhatikan temuan *neurologis* terbaru dalam cara otak kanan kiri bekerja. menggunakan selingan musik, diskusi, serta wawasan guru dalam *handle* daya paham siswa secara tepat momentum.

⁶ Lihat J Drost, "Proses Pembelajaran Masa Kini dan Masa Mendatang", dalam "Transpormasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga", (2000 :44-47)

⁷ Disampaikan pada "Forum Pakar Pendidikan", 28 Agustus 2001 di Universitas Sanata Darma, Yogyakarta.



Bagan 1. Instrumen Penyaringan (Seleksi) untuk Setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan Kurikulum 1994

Apa yang disebut "Pendidikan Dasar 9 Tahun" diterjemahkan sebagai pendidikan umum 9 tahun. Di akhir tahun, masing-masing jenjang ini (SD & SMP) diuji di Ebtanas, untuk kemudian melanjutkan ke SMU dengan urutan 2 tahun umum (kelas 1 dan 2), dan masuk ke penjurusan di kelas tiganya. Pilihan lainnya adalah SMK (Kejuruan). Tetapi ini pun juga tetap tergiring ke UMPTN, sehingga motif masuk ke Sekolah Kejuruan yang sebenarnya lebih menekankan pendidikan keterampilan sulit tersiapkan. Mereka yang masuk ke SMK biasanya karena nilai NEMnya rendah. Namun demikian dalam hati kecilnya tetap ingin ke UMPTN lewat jalur SMK, meskipun di SMK harus bisa mendapat nilai rata-rata 7. Peraturan ini menyebabkan semakin kuat *image* publik bahwa kejuruan adalah sekolah "kelas dua", terbukti adanya diskriminasi syarat "nilai khusus" untuk calon dari SMK tersebut, dan bukan atas dorongan rasional bahwa SMK diadakan

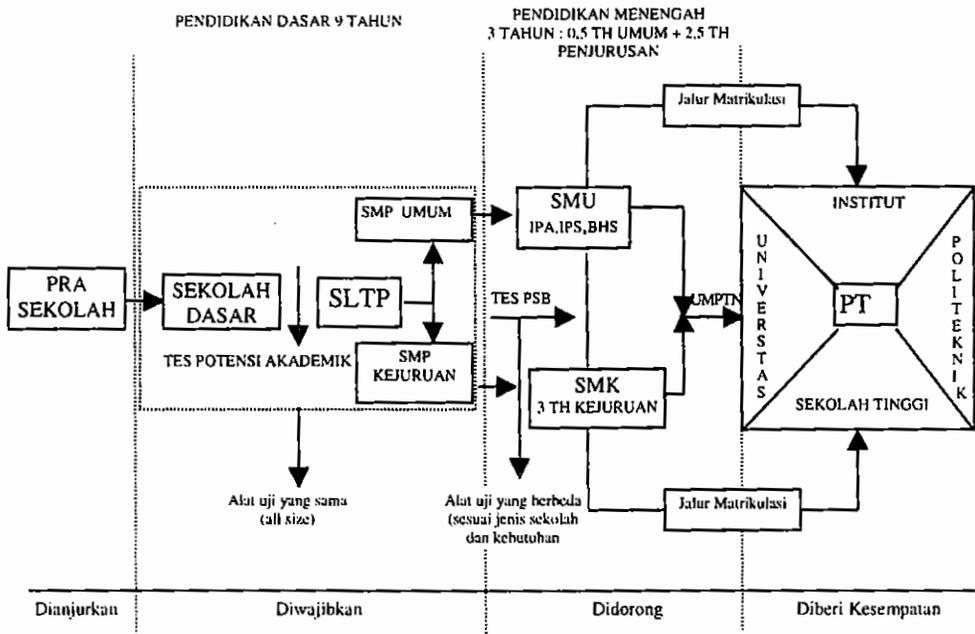
memang karena kebutuhan lapangan kerja menuntut diselenggarakannya program SMK. Adalah aneh, bahwa tingkat kompetensi siswa SMU dan SMK diperlakukan sama dengan NEM yang bersifat *all size*. Bagaimana mungkin SMK yang berorientasi "skill nyata" diuji dengan NEM yang notabene lebih bersifat ranah kognitif itu? Dimana *reasoning*-nya? Sampai sekarang tak pernah ada penjelasan, tetapi ekses *image* negatif yang muncul di masyarakat terhadap keberadaan SMK sebagai akibat pola ini terus saja berlangsung.

Sementara untuk meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi, baik SMU maupun SMK diuji dalam UMPTN yang juga menggunakan pola tes yang sama. Materi ujinya juga sama untuk semua jurusan di perguruan tinggi, yakni diukur dari tingkat kompetisinya dalam menyelesaikan soal-soal: (1) Kemampuan Dasar, yang terdiri dari Matematika Dasar, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; (2) Kemampuan IPA, yang terdiri dari

Matematika IPA, Fisika, Kimia, Biologi, dan IPA Terpadu. Materi ini diperuntukan bagi peserta UMPTN yang mengambil program IPA, baik yang berasal dari SMU maupun SMK. Sementara bagi peserta yang mengambil program IPS diwajibkan untuk mengikuti tes dengan materi: (1) Kemampuan Dasar yang sama seperti program IPA. dan (2) Kemampuan IPS, yang terdiri dari materi IPS dan IPS Terpadu. Pola tes ini jelas tidak adil terutama bagi peserta yang berasal dari SMK, karena memang rancang bangun kurikulumnya tidak dipersiapkan untuk mengikuti UMPTN. Selain itu pola UMPTN yang bersifat *all size* ini juga memunculkan bias dari hakekat UMPTN sebagai instrumen seleksi. Oleh karena mana

mungkin UMPTN bisa memprediksi potensi peserta apakah bisa atau tidak untuk mengikuti perkuliahan dengan baik, jika materi uji yang diberikan sama untuk setiap jurusan di perguruan tinggi. Konkretnya apa hubungannya penguasaan materi biologi yang harus dimiliki peserta tes program IPA dengan keinginannya untuk melanjutkan studi di jurusan teknik elektro, teknik informatika, komputer dan lain lain. Hal yang sama juga bisa diproyeksikan pada kelompok peserta UMPTN yang mengambil program IPS.

Penulis mengusulkan adanya reformasi baik dalam penjaluran sekolah maupun instrumen evaluasi dan seleksinya sebagaimana yang tervisualisasi berikut ini.



Bagan 2. Model Instrumen Penyaringan (Seleksi) untuk Setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan

Pemecahan masuk ke sekolah kejuruan dimulai sejak tingkat SLTP. Peluang ini sangat mungkin, terutama di era Otonomi Daerah. Tujuannya agar Pemda dapat mengurangi tingkat pengangguran di daerahnya dengan merasionalkan jalur pembelajaran sejak tingkat SLTP ini.

Sejak SLTP arus dipecah ke dalam dua jalur (SMP Umum dan Kejuruan). Setelah lulus mereka dibolehkan melanjutkan ke SMU (IPA, IPS, BHS) atau SMK yang bersesuaian dengan jenis sekolah mereka berasal dengan tidak menutup kemungkinan terjadinya alih jalur. Sementara instrumen seleksi yang digunakan untuk alih jenjang dari dari SLTP ke SLTA harus disesuaikan dengan jenis sekolah masing-masing. Khusus untuk alih jenjang ke SMK harus disesuaikan juga dengan kebutuhan perencanaan tenaga kerja daerah.

Sedangkan untuk jenis SMU - agak berbeda dengan kurikulum 1994-, dalam format ini setengah tahun awal digunakan untuk pembelajaran umum, dan 2,5 tahun sisanya untuk penjurusan, sehingga praktis pemantapan pilihan profesi sudah diarahkan sejak SMU. Dalam konteks ini sebenarnya bisa juga dibaca bahwa setengah tahun awal di kelas 1 SMU hakekatnya adalah masa "matrikulasi" sebelum mereka menempuh penjurusan total di 2,5 tahun berikutnya. Setelah lulus, mereka diberi kesempatan meneruskan ke perguruan tinggi. Dari jalur SMU bisa masuk ke universitas melalui UMPTN, dan melalui jalur matrikulasi jika ingin melanjutkan ke akademi atau sekolah tinggi kejuruan. Sedangkan bagi mereka lulusan SMK diharapkan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan

yang lebih tinggi melalui jalur akademi atau sekolah tinggi kejuruan. Disamping itu juga diberi kesempatan untuk dapat masuk ke jenjang universitas melalui jalur khusus (matrikulasi) yang bersifat pemantapan potensi akademik.

Khusus untuk UMPTN, penulis mengusulkan untuk merekonstruksi substansi materi ujinya. UMPTN yang selama ini bersifat *all size*, harus sudah digeser ke arah instrumen seleksi yang memang diperuntukkan guna memproyeksi dan memprediksi kualitas calon mahasiswa baru yang sesungguhnya. Materi uji kemampuan dasar yang sekarang hanya menguji ranah kognitif, yaitu kemampuan menyelesaikan materi pelajaran Matematika Dasar, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semestinya diganti dengan materi tes potensi kemampuan akademik (sejenis psikotes). Kemudian untuk lebih memberikan ketepatan dalam memproyeksi kualitas mahasiswa baru, pola tes hari kedua (Kemampuan IPA dan IPS) lebih didiversifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penjurusan di perguruan tinggi. Taruhlah, untuk Ilmu Teknik ada tes uji materi Ilmu Teknik, Ilmu Sosial dan Humaniora sendiri, Kedokteran sendiri, dan seterusnya.

Kelebihan dari format jalur mengenai jenjang dan jenis pendidikan di atas adalah:

1. Pemecahan jalur akan mencegah terjadinya berbagai dampak negatif dari perencanaan pendidikan yang terlalu terfokus pada SMU Umum saja, diantaranya:

- a. Mencegah terjadinya pemborosan biaya: SMP dan SMU umum dipersilahkan terus menggunakan kurikulum 1994;

yang notabene memang dirancang untuk kelompok cerdas (sekitar 30% dari populasi siswa). Di sini program akselerasi atau eskalasi dapat dilakukan. Demikian juga usaha menyempurnakan fasilitas lab dapat dilakukan.

- b. **Mencegah terjadinya arus bottleneck di jalur Universitas (UMPTN).** Dengan terpecahnya arus, maka panitia UMPTN tidak perlu disibukan oleh kegiatan yang berkelanjutan untuk menyempurnakan jebakan soal-soal UMPTN sebagaimana sudah diuraikan di atas, sehingga waktu dan biaya yang ada bisa dipakai untuk melakukan pendalaman tes yang bersifat holistik. Tesnya sendiri, misalnya harus bisa membaca potensi sukses para siswa dalam belajar di perguruan tinggi dan masa depannya nanti, baik dari segi IQ, EI maupun SQ-nya. Dalam kenyataannya, kehidupan tidaklah berjalan linier ala hukum Newtonian. Ada siswa yang ketika SMU-nya prestasi NEM-nya biasa saja (karena salah kelola), tetapi di Perguruan Tinggi mengalami kenaikan yang spektakuler. Ketika diteliti ternyata anak tersebut mengalami semacam "kebangkitan spiritual" karena dorongan dosennya. Hebatnya justru di mata kuliah paling berat di jurusannya sekalipun, ia mengalami transformasi SQ

(kecerdasan spiritual) yang memacu prestasi akademiknya.

- c. **Mendorong Pematangan Profesi:** Dengan tersiapkannya program penjurusan sejak SLTP, anak didik akan "tersiapkan mentalnya" untuk memasuki jalur profesi tertentu yang menjadi andalan setiap daerah secara lebih dini. Termasuk dalam pengertian lebih dini di sini adalah kurikulum yang dapat menyuntikkan berbagai isu dan ethos kerja yang progresif kepada siswa. Bukan dalam bentuk bahan ajar seperti halnya P4 dulu, tetapi dalam bentuk berbagai simulasi semacam *outbound*, yang ditujukan untuk membentuk mentalitas, bukan membangun kesadaran kognisi. Pada prinsipnya, SMP kejuruan ini betul-betul harus mampu membentuk manusia-manusia yang trampil, memiliki wawasan teknis yang memadai, siap latih (selaku *mean wokers*), sadar kualitas, dan sebagainya. Kata "siap latih" di sini, bisa didekatkan dengan proses pemagangan di industri yang ada di suatu daerah. Pokoknya harus ada usaha sistemik untuk mengangkat citra Sekolah Kejuruan⁸, melalui Perencanaan

⁸ Pada sekitar tahun 1975-an, melalui Bank Dunia di Indonesia pernah diperkenalkan pola "STM/SMA Pembangunan" dimana para siswanya sudah dipesan oleh industri ketika mereka masih di kelas 2. Proyek ini, terutama untuk STM Pembangunannya mendapatkan sambutan yang luar biasa dari publik. Terbukti dari tingginya animo yang mendaftar ke sini berasal dari kalangan siswa berprestasi tinggi. Apalagi ketika mereka mendapatkan bea siswa. Maka martabat Sekolah

Tenaga Kerja daerah/antar daerah yang *link and match* dengan keadaan lapangan. Dalam konteks inilah menjadi terasa pentingnya pola *School Based Management*⁹ dikembangkan di daerah.

2. Setiap lulusan sekolah menengah yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan lebih merasa realistis dengan pilihannya. Ini karena dengan masa penjurusan minimal 2,5 tahun, kesempatan untuk mendapatkan pengenalan dan pematangan profesi menjadi lebih terbuka. Kasus-kasus terjadinya peserta tes yang salah memilih jurusan dengan sendirinya akan terminimalisir.
3. Dengan pola seleksi sebagaimana disebutkan di atas, diskriminasi terhadap jenis dari setiap jenjang pendidikan tidak akan pernah terjadi, karena memang diberi pilihan dan kesempatan yang sama meskipun dengan beberapa persyaratan khusus.

KESIMPULAN DAN SARAN

Apabila ketiga butir tersebut di atas sudah dapat "dirasionalkan" arusnya, maka semakin mudah bagi masing-masing jenjang untuk mengembangkan butir-butir alat tes dengan standar kompetensi dan

kompetisi yang jelas jangkauan targetnya. Bagi SLTP/SLTA Umum pola Ebtanas bisa diteruskan, karena jalur ini memang diprogram untuk mengikuti jalur akademis berikutnya hingga ke Universitas. Jalur mereka memang jalur pengembangan keilmuan murni.

Akan tetapi pada SLTP/SLTA Kejuruan, Ebtanas tidaklah bisa berdiri sendiri sebagai alat ukur prestasi siswa. Di dalam sekolah kejuruan, masih lebih banyak elemen prestasi lain yang pengujiannya harus lebih dari sekedar tes kognitif. Di Sekolah Kejuruan, dimensi *skill* (psikomotorik), sikap mental kerja, paradigma kerjanya, ethosnya dan sebagainya harus mendapatkan perhatian utama. Lebih dari itu, semua tes di Sekolah Kejuruan ini harus diperlakukan lebih sebagai sebuah bahan untuk "perencanaan matrikulasi" apabila mereka nanti naik ke jenjang yang lebih tinggi. Ini berarti, di jalur Sekolah Kejuruan tidak perlu ada sertifikat lulus, cukup dinyatakan selesai dengan berbagai catatan akademik yang diperlukan sehingga ketika si siswa diterima di SLTA, Akademi, atau Sekolah Tinggi Kejuruan, yang bersangkutan dapat mengikuti program matrikulasi yang relevan dengan situasinya masing-masing.

Jadi, apakah Ebtanas dan UMPTN perlu direformasi? Jawabnya perlu. Tetapi reformasi yang akan dilakukan harus didahului dengan usaha merasionalkan dahulu lahan jalur persekolahan yang ada. Apabila rasionalisasi ini sudah dapat dilakukan, maka bentuk reformasi sistem evaluasi ataupun seleksi yang dikembangkan hanyalah pendalamannya saja. Format tes seleksi harus lebih "holistik" yang

Kejuruan sebenarnya mudah saja mengangkatnya jika pemerintah punya kesungguhan menggarap kejuruan ini.

⁹ School Based Management adalah sekolah sebuah proses "Demokratisasi Pendidikan" dimana peran Orang tua, Guru, Tokoh Masyarakat dan siswa sendiri dalam perencanaan kurikulum sekolah sangat besar. Kurikulum dirancang secara lokal sesuai dengan kebutuhan lokalitas dan konteks lingkungan sekitarnya.

memang ditujukan untuk memprediksi kemampuan calon mahasiswa dalam menempuh jenjang pendidikan lanjut. Dengan kata lain "Totalitas Holistik Pencapaian Belajar" siswa, baik di tingkat SLTP maupun SLTA harus dapat ditakar oleh sistem seleksi ini, dan bukan elemen-elemennya belaka.

Format soal UMPTN sekarang masih terlalu terkonsentrasi pada usaha menakar penyerapan elemen-elemennya, dan itupun sebatas ranah kognitif saja (kemampuan semacam itu sebenarnya telah berhasil mereka "beli" secara instan di Bimbingan Belajar) dan itu bukanlah hasil belajar SLTA yang sesungguhnya. Apalagi untuk menunjukkan prediksi kemampuan belajar di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, 1999, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta
- Boe, E.E. & Gilford, D.M. (Eds), 1992, *Teacher Supply, Demand, and Quality: Policy Issues, Models, and Data Bases*. National Research Council, Washington.
- DePorters, Bobbi, 2000, *Quantum Teaching*, (Terjemahan), Kaifa, Bandung
- Dewey, John, 1975, *Philosophy of Education*, Adam & Co. Totowa, New Jersey.
- Drucker, F., Peter, 1997, *The New Realities* (terjemahan), Elex Media Komputindo, Jakarta

- Dryden, Gordon, 1999, *The Learning Revolution: To Change the Way the Word Learns* (Terjemahan), Kaifa, Bandung
- Freire, Paulo, 1999, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Golleman, Daniel, 1995, *Emotional Intelligence* (terjemahan), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Husen, Torsten, 1988, *Masyarakat Belajar*, Rajawali Press, Yogyakarta
- Illich, Ivan, 2000, *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah* (Terjemahan), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Masoem, A. Toemin, 1997, *Ebtanas atau UMPTN: Mana Yang Lebih Dapat Diandalkan*, UI Press, Jakarta
- Suryadi, Ace, dan Tilaar, H.A.R, 1994, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*, Rosda Karya, Bandung
- Suyanto, dan Abbas, 2001, *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*, Adi Cita, Yogyakarta
- Tilaar, H.A.R, 1988, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, Tera Indonesia, Jakarta
- Zamroni., 2001, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta